

BAB III

DUKUNGAN RUSIA TERHADAP KEANGGOTAAN PALESTINA DI PBB

A. Sejarah Palestina di Timur Tengah

Terhadap sejarah perjalanan negara Palestina di Timur Tengah, maka dapat dijelaskan sejarah mulai terbentuknya negara Palestina, sampai upaya kemerdekaan negara Palestina dan merebut peta wilayah secara internasional terhadap Israel. Sejarah Palestina dapat dijelaskan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Sejarah Negara Palestina

Palestina adalah sebuah nama untuk menyebut wilayah Barat Daya negeri Syam. Sebuah wilayah yang terletak di bagian barat benua Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Palestina terletak di titik strategis penting, karena dianggap sebagai penghubung antara benua Asia dan Afrika, di samping sebagai sentra yang mempertemukan wilayah dunia Islam.²⁵

Nama klasik yang terkenal untuk sebutan negeri ini adalah “tanah Kan’an”, karena yang pertama kali bermukim di sini yang dikenal dalam sejarah adalah bangsa Kan’an, mereka datang dari Jazirah Arab sekitar 2500 tahun SM. Adapun nama Palestina sendiri diambil dari salah satu bangsa-bangsa pelaut, kemungkinan mereka datang dari daerah barat Asia kecil dan wilayah laut Ijeh sekitar abad ke

²⁵ Sumber: Anwariansyah- www.wikimu.com. Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2011.

12 SM. Nama ini ditemukan diukiran Mesir dengan nama "Ba Lam Sin Ta, PLST". Adapun penambahan Nun "N" kemungkinan untuk menunjukkan kata plural atau jama'. Mereka bermukim di wilayah-wilayah pesisir dan berasimilasi dengan orang-orang Kan'an dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun orang-orang Kan'an memberikan nama buat tanah wilayah tersebut dengan nama mereka (orang-orang Palestina).

Mengenai bentuk dan batas-batas wilayah Palestina pada zaman dahulu belum dikenal secara konkrit seperti sekarang, kecuali pada masa penjajahan Inggris atas Palestina tahun 1920-1923. Dalam perjalanan sejarahnya, penetapan batas wilayah ini terkadang menyempit dan meluas, namun secara umum ada hal yang konstan tentang wilayah ini bahwa ia tetap terletak di antara Laut Tengah, Laut Mati dan Sungai Jordan sebagai bagian dari wilayah negeri Syam.

Sangat sulit menetapkan batas-batas wilayah Palestina secara historis, karena kajian yang kami lakukan di sini tidak mengarah kepada kajian yang bersifat tafsili daqiq (rinci dan detail). Namun demikian kami akan membahas sekilas tanda-tanda perkembangan historis terpenting bagi batas-batas ini. Pada masa Bizantium, dan sampai pertengahan abad IV masehi, wilayah Palestina terbagi menjadi tiga daerah administratif, yaitu:

- a. Palestina I: Batas wilayah ini meliputi sebelah utara mulai dari selatan gunung Karmel dan padang Ibnu Ameer, sebelah selatan berupa garis

yang membentang dari selatan Rafah ke arah timur sampai pertengahan Laut Mati. Perbatasan timur wilayah ini meliputi bagian-bagian timur Yordania, garis perbatasannya melewati selatan Bisan dan membelah sungai Yordan yang mengelilingi wilayah antara Ajlon untuk sebelah utara dan ujung Laut Mati untuk sebelah tenggara. Yang menjadi jantung Palestina I ketika itu adalah kota Qasariyah yang meliputi kota al Quds, Nablus, Yafa, Gaza dan Asqalan.

- b. Palestina II: Wilayah ini meliputi pegunungan el Jalil, Maraj Ibn Ameer dan dataran-dataran tinggi yang membentang ke arah timur dari danau Thabriyah, yakni wilayah-wilayah bagian timur Yordania dan Suriah sekarang ini.
- c. Palestina III: Wilayah ini mencakup daerah-daerah yang terletak di sebelah selatan garis Rafah Laut Mati, sampai Teluk Aqabah. Wilayah ini berpusat di kota al-Betraa yang sekarang ini terletak di wilayah bagian timur Yordania.

Ketika Palestina masuk di bawah pemerintahan Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khathab radiyallahu 'anhu maka dianggap sebagai bagian dari negeri Syam. Saat itu negeri Islam dibagi menjadi tujuh wilayah, dan Syam adalah salah satu dari ketujuh wilayah tersebut. Pada masa khulafaur Rasyidin,

secara administratif negeri Syam terbagi menjadi beberapa kota administratif, yakni kota administratif Himsh, Damaskus, Palestina dan Yordania.²⁶

Sedang pada masa kekhalifahan Bani Umayyah ditambah kota administratif yang kelima, yaitu kota administratif Qanisrain. Wilayah kota administratif Palestina membentang dari Rafah yang berbatasan dengan Sinai sampai ke el Lajun, yaitu sebuah kota yang terletak setelah 18 kilometer barat laut kota Jenin. Wilayah administratif Palestina beribukotakan Alladu sampai akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik menjadi wali wilayah ini pada masa kekhalifahan saudaranya, Khalifah Alwalid bin Abdul Malik, pada tahun 1986 sampai 1997 Hijriah. Kemudian Sulaiman memerintahkan pembangunan kota Remlah yang kemudian menjadi ibukota wilayah ini.

Selanjutnya Palestina menjadi wilayah yang terlepas berdiri sendiri pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu setelah masa pemerintahan Abu Abbas al Sifah dengan Remlah tetap menjadi sentral pemerintahan. Setelah terlepas berdiri sendiri, Palestina terbagi menjadi 12 Kurah (kota). Yaitu Remlah, Eilia (al Quds), Amwas, Alladdu, Yabna, Yafa, Qaisariya, Nablus, Sabastiyan, Asqalan, Gaza, Beit Jabrain serta bergabung ke dalamnya wilayah pinggiran, Zagar, Diyar Qaum, Lud, Syara dan pegunungan hingga Aila di Teluk Aqabah.

Adapun kota administratif Yordania, berdasarkan fakta-fakta kontemporer, sekarang ini menjadi bagian wilayah timur Yordania, wilayah utara Palestina dan

²⁶ *Ibid.*

selatan Lebanon. Ketika itu, Yordania merupakan kota administratif terkecil dari negeri Syam yang berpusat (ibukota) Thabriya, yang terdiri dari 13 Kurah. Yaitu Thabriya, Samira, Bisan, Fuhl, Jursy, Beit Ras, Jadr, Abil, Susiya, Shafwariya, Aka, Qadas (utara Shafad) dan Shur.

Pada masa pemerintahan Mamalik (tahun 1250-1517), secara administratif negeri Syam terbagi menjadi beberapa wilayah perwakilan (niyabah). Wilayah Palestina terdiri dari tiga niyabah, yaitu Shafad, al Quds dan Gaza. Niyabah Shafad meliputi wilayah dari utara Palestina dan selatan Lebanon sampai ke sungai Lithani. Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani di Syam (tahun 1516-1918), negeri ini terbagi menjadi tiga iyalah (distrik), yaitu iyalah Damaskus, Halb dan Tharablus. Setiap iyalah terdiri dari beberapa daerah administratif yang disebut sanajiq. Ketika itu sanajiq Nablus, Gaza, al Quds, Lajun dan Shafad berada dalam iyalah Damaskus. Sanajiq Nablus meliputi bagian-bagian wilayah timur Yordania. Ketika dibentuk iyalah baru Shaida pada tahun 1660, masuk dalam distrik ini wilayah Shafad yang kemudian sentral pemerintahan berpindah ke Aka pada tahun 1777.²⁷

Setelah itu turut bergabung dalam iyalah Shaida kota al Quds, Nablus dan Balqa. Dan ketika terbit sistem kewilayahan baru pada tahun 1864 iyalah Shaida bergabung dalam wilayah (propinsi) Suriah. Dan ketika dibentuk wilayah

²⁷<http://www.detiknews.com/read/2008/12/28/175252/1060266/10/fpi-buka-posko-mujahidin-ke-palestina>.

(propinsi) Beirut pada tahun 1887, Aka, Balqa dan tiga kota lainnya pisah dari wilayah Suriah membentuk propinsi-propinsi (wilayah) baru. Wilayah Beirut membentang sampai penghujung jalan antara Nablus dan al Quds, yang mencakup kota Aka dan Balqa yang berpusat di Nablus yang meliputi pinggiran Jenin, Bani Sha'b, Jamain dan Salth. Saat itu kota Aka mencakup pinggiran Haifa, Nashira, Thabriya dan Shafad. Wilayah-wilayah utara Palestina ini masih tetap menjadi bagian wilayah Beirut sampai tahun 1914. Sedangkan distrik al Quds, melihat dari urgensi dan kekhawatiran Daulah Utsmaniyah dari ketamakan zionis Yahudi, serta masuknya campur tangan negara asing dalam urusan al Quds, pihak daulah memisahkannya dari Propinsi Suriah, dan dinyatakan sebagai wilayah otonomi yang berdiri sendiri dan langsung terikat oleh pemerintah pusat sejak tahun 1874. Wilayah ini meliputi bagian tengah dan selatan Palestina, yang diikuti wilayah pinggiran al Quds, Yafa, Gaza dan Hebron (al Khalil). Pada tahun 1909 dibangun pinggiran Bi'r Sebaa yang sebelumnya merupakan bagian dari pinggiran Gaza. Melihat kuatnya kekuasaan al Quds, beberapa kali terjadi penggabungan wilayah Nablus (Balqa') juga pinggiran Nashira selama tahun 1906-1909. Kekuasaan otonomi al Quds ini terus berlanjut hingga akhir kekhalfahan Daulah Utsmaniyah.²⁸

Dari penjelasan tentang tentang batas-batas geografis Palestina tersebut, maka kami sebenarnya hanya ingin menegaskan beberapa point yaitu:

²⁸ *Ibid.*

- 1) Bahwa penamaan Palestina adalah penamaan sudah ada sejak lama (klasik). Yang secara ghalib meliputi daerah antara Laut Tengah, Laut Mati dan Sungai Yordan.
- 2) Bahwa Palestina adalah wilayah bagian dari negeri Syam. Karenanya, pembagian wilayah secara administratif, penamaan wilayah-wilayah, perluasan sebagian wilayah dan penyempitan sebagian yang lain, tidak pernah mempengaruhi perasaan penduduk aslinya, bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari umat Islam yang utuh. Bahwa loyalitas mereka kepada pemerintah takkan pernah goyah selama pemerintahnya adalah muslim.
- 3) Bahwa pembagian wilayah secara administratif tidak lain hanyalah pembagian secara teknis belaka, untuk membudahkan kontrol yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah dalam rangka mengelolah propinsi-propinsi yang ada. Bahwa perubahan itu tidak memberikan dampak sensitif apapun pada masyarakat umum. Bahwa perubahan ini terjadi sebagaimana terjadi pada negeri manapun saat ini. Mulai dari perluasan, penyempitan atau penamaan kembali terhadap propinsi-propinsi, distrik dan yang sejenisnya tanpa harus merombak esensi kehidupan manusia. Oleh karena itu, hal yang alami apabila wilayah utara Palestina menjadi bagian kota Yordania, juga wilayah-wilayah timur Yordania menjadi bagian Palestina. Kemudian wajar juga bila terjadi wilayah-wilayah utara

Palestina menjadi bagian wilayah (propinsi) Beirut, atau kota Nablus menjadi pusat propinsi Balqa', dan seterusnya.

- 4) Bahwa adanya wawasan sempit dan hubungan sosial tidak pernah terjadi di antara masyarakat negeri Syam (dan kaum muslimin secara umum).
- 5) Bahwa kebebasan untuk berpindah-pindah, bergerak, bermukim, bekerja dan kepemilikan adalah hal yang wajar dan alami yang bisa dilakukan oleh semua masyarakat negeri Syam tanpa ada perasaan sempit dan terikat.
- 6) Bahwa pembatasan-pembatasan berdasarkan territorial serta status kebangsaan berdasarkan domisili wilayah sangat jauh dari kehidupan masyarakat muslim sepanjang masa pemerintahan Islam sampai akhir kekhalifahan Daulah Utsmaniyah. Benih-benih kebangsaan dan nasionalisme sempit tidak pernah tumbuh kecuali setelah jaman penjajahan Barat. Namun sayang sekali hal itu tidak mengakar, kecuali dengan munculnya negara-negara domestik Arab dan negara-negara Islam yang berdiri sendiri.

Ketentuan tersebut yang menjadi dasar bahwa Negara Palestina harus mendapat perlindungan hukum Internasional dari Negara-negara lain terutama PBB. Kemudian terlihat juga adanya kebiasaan orang-orang Arab menyebut tanah Palestina dengan nama Suriah Selatan. Ini tidak lain karena adanya anggapan

bahwa Palestina merupakan bagian dari Suriah (negeri-negeri Syam). Pada masa pemerintahan Arab di Damaskus (sejak awal Oktober 1917 sampai Juli 1920), Palestina meskipun dijajah Inggris tetapi tetap menjadi perwakilan dalam muktamar umum Suriah. Bahkan surat kabar Arab yang pertama kali terbit setelah penjajahan Inggris mengusung nama Suriah Selatan (Suriya al Janubiyah). Kebanyakan tokoh-tokoh Palestina berada di Suriah (Damaskus), diantaranya adalah para wakil dalam muktamar Suriah yang memproklamirkan kemerdekaan Suriah pada tanggal 8 Maret 1920. Nama ini tidak pernah lenyap dari Palestina kecuali setelah pertempuran Meislon, penjajahan Perancis atas Suriah dan jatuhnya pemerintahan Arab di Suriah pada Juli 1920.²⁹

Di bawah kolonialisme Inggris, perbatasan antara Palestina dengan Lebanon di satu pihak dan Lebanon dengan Suriah di pihak lain. Ini berdasarkan perjanjian Inggris Perancis yang diadakan pada 23 Desember 1920, yang kemudian ada beberapa perubahan pada tahun 1922 -1923. Adapun perbatasan Palestina dengan wilayah timur Yordania ditetapkan oleh perutusan Palestina dan wilayah timur Yordania pada awal September tahun 1922. Dengan penetapan perbatasan ini, maka luas wilayah Palestina mencapai 27009 kilometer persegi, yang membentang antara garis 29 300 dan 33 150 lintang utara, dan antara garis 34 150 dan 35 400 bujur timur. Panjang perbatasan Palestina dengan wilayah timur

²⁹ *Artikel. Konflik Israel-Palestina, bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas. November 2009.*

Yordania mencapai 360 kilometer, dengan Suriah mencapai 70 kilometer, dengan Lebanon mencapai 79 kilometer dan dengan Mesir mencapai 210 kilometer. Sedang pantai Palestina di Laut Tengah panjangnya mencapai 224 kilometer.

Akhir-akhir ini terjadi keprihatinan yang mendalam di bumi Palestina. Beribu orang tewas akibat serangan Israel ke jalur Gaza yang dimulai tanggal 27 Desember 2008. Dunia pun bergejolak. Beberapa negara dengan keras menentang Israel bahkan dengan memutuskan hubungan diplomatiknya. Unjuk rasa menentang serangan Israel pun terjadi di mana-mana termasuk di Indonesia. Namun, perang masih mungkin meletus hingga beberapa tahun mendatang.

Palestina memang memiliki sejarah yang pelik. Israel, yang merupakan bangsa Yahudi, mendirikan negaranya di atas tanah Palestina. Hal ini menyebabkan situasi berkembang hingga keadaan sekarang.

2. Berdirinya Negara Israel Sebagai Awal Perjalanan Menuju Kemerdekaan

Sejarah pada tahun 1914, muncul perselesihan antara Inggris Raya dan Turki. Akhirnya menyebabkan keduanya berperang. Palestina sempat dijadikan markas militer oleh Turki. Namun, akhirnya tahun 1918 Inggris resmi menang, dan Palestina dikuasai oleh Inggris.³⁰

Tanggal 2 November 1917, keluar deklarasi menteri luar negeri Inggris, Arthur Balfour, yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi ini berisi

³⁰ *Ibid.*

tentang dukungan Inggris terhadap pendirian negara Yahudi di Palestina. Hal ini disebabkan oleh bangsa Yahudi telah membantu Inggris dalam memenangi Perang Dunia I dan Inggris ingin menguasai Palestina karena berada di daerah strategis di antara Asia, Eropa, dan Afrika.

Pada tahun 1920, kantor pemerintahan Inggris di Palestina (British Mandate of Palestine) berdiri, Komisi Tinggi-nya adl Herbert Samuel. Setelah tahun-tahun tersebut, imigrasi Yahudi ke daerah Palestina terus meningkat. Orang Yahudi yang baru datang, biasanya masuk ke kota dan mendirikan perusahaan-perusahaan di sana. Tahun 1929, mulai terjadi kerusuhan besar antara bangsa Arab dan Yahudi. Konflik ini terjadi karena adanya perebutan hak-hak beberapa tempat suci di Yerusalem. Selain itu, berdasarkan hasil penyelidikan tim yang dibuat Inggris, hal ini terjadi karena orang-orang Arab tertekan dengan pembelian tanah dan imigrasi orang Yahudi yang akhirnya mendesak mereka.

Tahun 1933, bangsa Yahudi hanya berjumlah 17% dari seluruh masyarakat Palestina. Namun, setelah masa itu, saat Hitler berkuasa di Jerman dan Polandia, terjadi gelombang migrasi besar-besaran dari Eropa ke Palestina. Pada saat itu juga terjadi perubahan politik di Timur Tengah. Mesir dan Suriah yang merdeka menyebabkan tumbuhnya nasionalisme untuk memerdekakan diri. Akhirnya timbul wacana untuk melepaskan Palestina dari Inggris.

Tahun 1938, Konflik antara Arab-Yahudi memuncak. Inggris mengeluarkan mandat yang intinya akan membagi Palestina menjadi dua bagian, yaitu untuk Arab dan Yahudi untuk menghentikan perpecahan. Namun, beberapa tahun kemudian mandat itu dicabut dan diganti dengan white paper yang intinya mendesak dibentuk satu pemerintahan gabungan antara Arab dan Yahudi. White-paper ini ditentang oleh bangsa Yahudi.

Pada saat itu, bangsa Yahudi yang tinggal di Amerika memegang peranan penting dalam perekonomian Amerika. Hal ini menyebabkan Amerika berpihak kepada kepentingan bangsa Yahudi. Inggris yang mulai merasa terganggu hubungannya dengan Amerika akhirnya menyerahkan tentang Palestina ke PBB. Inggris sendiri akan menarik mandatnya dari Palestina tanggal 15 Maret 1948. Pada tanggal 1 September 1947, PBB menyarankan agar Palestina dibagi 2, yaitu:

1. Menjadi daerah untuk bangsa Yahudi termasuk Israel,
2. Juga menjadi bangsa Arab yang ada di Timur Tengah.

Bangsa Yahudi dan Arab yang tinggal di Palestina saling berebut pengaruh dan menolak aturan tersebut. Mulailah berbagai perang gerilya yang melibatkan keduanya. Namun, sayangnya, semangat bangsa Yahudi lebih berlipat dibanding dengan bangsa Arab di sana. Di saat terjadi perang, para ningrat Arab malah kabur ke negara lain. Tanggal 14 Mei 1948, Israel diproklamirkan orang-orang Yahudi. Esoknya Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel.

Negara-negara Arab di sekitar Palestina menolak kehadiran Israel di sana. Terjadilah perang. Israel menang telak, dan akhirnya menguasai seluruh daerah Palestina kecuali Tepi Barat yang dikuasai Suriah dan Jalur Gaza yang dikuasai Mesir. Terjadi pengungsian besar-besaran bangsa Palestina dari Palestina. Penduduk Palestina terbagi menjadi 3, yang tinggal di pendudukan Israel, tinggal di jalur Gaza dan Tepi Barat, dan yang mengungsi ke daerah-daerah luar Palestina. Setelah itu, sering terjadi bentrok antara Israel dan negara-negara sekitarnya. Tahun 1964 berdiri PLO (Palestinian liberation Organization), sebuah organisasi yang nantinya diakui sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili aspirasi masyarakat Palestina. Pada kelanjutannya, PLO dipimpin oleh Yaseer Arafat. Pada tahun 1967, terjadi perang 6 hari antara Israel-Mesir. Mesir kalah telak sehingga Israel berhasil menduduki daerah Sinai. Tahun 1973, Mesir dan Suriah bersatu untuk menyerang Israel, namun Israel menang dan menguasai daerah hingga mendekati Terusan Suez. Mesir akhirnya mengakui keberadaan negara Israel, dengan imbalan daerahnya sampai dengan Sinai dikembalikan ke Mesir (tercantum dalam Perjanjian Camp David 1978).

Sejak saat itu, wilayah Palestina dikuasai Israel. Israel sendiri demi kepentingan zionismenya, membentuk perumahan-perumahan untuk bangsa Yahudi di daerah Palestina. Israel sendiri menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat. Di sana, bangsa Palestina dijadikan masyarakat kelas dua. Perumahan mereka

digusur dan diteror. Bangsa Palestina terus menerus menderita di bawah pendudukan Israel.

Akibat dari tekanan pendudukan Israel, muncullah gerakan yang dinamakan Intifada pada tahun 1987. Gerakan Intifada sendiri, yang secara harfiah berarti “pemberontakan”, merupakan gerakan melawan tentara Israel yang bersenjata dengan batu-batu dan ketapel. Seluruh aspek bangsa Palestina, baik itu anak-anak dan orang tua, lelaki dan wanita melakukan perjuangan dengan melempar batu ke arah tentara-tentara Israel yang bersenjata dan bertank lapis baja. Selain itu munculnya beberapa kelompok-kelompok garis keras, seperti HAMAS pada tahun 1987, yang memiliki pemikiran bahwa satu-satunya cara menguris Israel dari Palestina adalah dengan perang jihad.

B. Upaya Palestina Menuju Kemerdekaan

Konflik Palestina dengan Israel yang berlangsung sejak tahun 1948 hingga kini seperti tidak akan pernah bisa diakhiri. Penyerangan–penyerangan di antara kedua belah pihak selalu akan terjadi. Pihak Israel beralasan mempertahankan diri dari serangan pejuang Palestina dan tentara Hamas, sedang pihak Palestina mengadakan perlawanan karena merasa wilayahnya semakin menyempit direbut rezim zionis dengan pendudukan bersenjata maupun mendirikan pemukiman-pemukiman yahudi dengan cara merampas tanah rakyat Palestina. Masyarakat dunia khususnya negara-negara Arab yang semula memihak bangsa Palestina dan berperang dengan Israel untuk membela hak–hak bangsa Palestina yang dijajah,

akhirnya lebih banyak berdiam diri. Terutama sejak berdirinya negara Palestina secara resmi pada tanggal 15 Nopember 1988, dukungan negara Arab semakin melemah terhadap perjuangan bangsa Palestina menghadapi rezim zionis yang didukung mutlak oleh Amerika Serikat.³¹

Pada 30 Oktober 1991, dimulai konferensi Madrid, antara Israel dan Palestina yang diwakili oleh PLO. Pertemuan berlanjut sehingga pada 13 September 1993, ditandatangani Perjanjian Oslo yang berisi PLO diberi wilayah otonomi, yaitu 60% dari Jalur Gaza dan kota Ariha di Tepi Barat. Imbalannya, PLO mengakui eksistensi Israel. Pada 1 Juli 1994, Arafat memasuki Gaza dalam rangka mendirikan Otoritas Nasional Palestina (Palestinian National Authority; selanjutnya disebut PNA). Pada 1996 diadakan pemilu pertama bangsa Palestina, Yasser Arafat terpilih menjadi Presiden. Selanjutnya muncul beberapa perjanjian seperti:

- a) Tanggal 17 Januari 1997, Perjanjian Al Khalil ditandatangani Israel-Palestina yang berisi 20% wilayah Al Khalil tetap dikuasai Israel, sisanya diserahkan kepada Palestina.
- b) Tanggal 23 Oktober 1998, Perjanjian Maryland ditandatangani Israel-PNA. Berisi Israel menyerahkan sebagian wilayah di Tepi Barat kepada PNA, sebagai imbalan, PNA berjanji mengatasi masalah terorisme

³¹ Kirdi Dipoyuda. *Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia*. Jakarta: CSIS, 1981.

(terorisme sendiri merujuk kepada tindakan HAMAS) Wilayah Palestina sendiri terbagi dua, yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza yang masing-masing dipisahkan oleh wilayah Israel.

- c) Tanggal 28 September 2000, Intifadah Kedua dimulai, dipimpin oleh HAMAS. PNA sendiri dalam pihak yang bertentangan dengan HAMAS. PNA lebih milih untuk berdialog daripada berperang. Pada 26 Okt 2004, gigihnya perjuangan Intifadah II membuat Israel kewalahan dan mengesahkan program penarikan mundur dari Jalur Gaza. Pada, 11 Nov 2004 Yaser Arafat meninggal. Kepemimpinan di PLO digantikan oleh Mahmoud Abbas. September 2005 dimulai penarikan mundur tentara Israel dari Jalur Gaza. Inilah kemenangan para pejuang Palestina setelah 38 tahun. Namun, Israel terus melancarkan serangan dan teror ke Jalur Gaza. Selain itu, Israel mendirikan tembok-tembok pembatas yang mengucilkan pemukiman Palestina dan memperlebar perumahan bagi bangsa Yahudi.³²

Kemudian pada Tahun 2006 muncul Pemilu di wilayah tersebut. HAMAS memenangi pemilu. Namun, sebagian besar negara barat menolak hasil pemilu ini karena menanggapi HAMAS adalah teroris dunia. HAMAS sendiri berpusatkan di daerah Jalur Gaza. Beberapa kali terjadi bentrok antara HAMAS dan Israel yang ditandai saling meluncurkan roket dan misil di perbatasam. Hal ini memaksa

³² *Ibid.*

perang terjadi. Perang yang terakhir terjadi pada Desember 2008. Pasca gencatan senjata berakhir pada November 2008, tank-tank Israel masuk ke perbatasan jalur Gaza dan milisi HAMAS menembakkan roket ke arah Israel dari Jalur Gaza. Akhirnya, dimulailah perang yang ditandai dengan tanggal 27 Desember 1998, Israel melakukan serangan udara yang diikuti serangan darat ke arah Jalur Gaza dengan dalih memusnahkan HAMAS. Perang terjadi sampai dengan 19 Januari 2008 dan menewaskan 1200 lebih warga Palestina dan belasan tentara Israel. Sayangnya, dari kebanyakan warga yang tewas bukanlah dari kalangan militer. Bahkan, sekitar 600 orang merupakan anak-anak dan perempuan.

Dengan memperhatikan sejumlah fakta yang ada, maka selanjutnya tentu saja memunculkan pertanyaan dalam benak kita, masih mungkinkah ada jalan keluar lewat perdamaian dari konflik berkepanjangan tersebut? Dalam buku "Ahmadinejad on Palestine", dijelaskan dengan cukup terperinci bahwa selama ini, Amerika Serikat sebagai pendukung utama Israel, berkali-kali telah memediasi perundingan perdamaian antara Palestina-Israel. Setidaknya ada dua perjanjian penting yang pernah ditandatangani kedua pihak, yaitu Perjanjian Oslo I dan Perjanjian Oslo II. Namun, kedua perjanjian ini tidak membawa perbaikan apa pun bagi Palestina karena satu alasan : ketidakadilan. Menurut Ahmadinejad, 'keadilan' adalah syarat utama untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.

Dalam Perjanjian Oslo I atau disebut juga Perjanjian Gaza-Jericho, poin utamanya adalah Israel menyetujui pembentukan pemerintahan otonomi (otoritas

Palestina). Wilayah 'pemerintahan' yang diberikan hanya Gaza dan Jericho, dan secara bertahap dalam lima tahun Israel akan menarik mundur tentaranya dari Tepi Barat. Sebagai imbalannya, Otoritas Palestina bersedia; mengakui kedaulatan Israel dan menjaga keamanan orang-orang Israel dari serangan teroris. Tetapi yang terjadi melalui perjanjian ini, PLO yang menempatkan diri sebagai wakil bangsa Palestina seolah-olah telah 'membeli' posisi Otoritas Palestina dengan sepotong wilayah. Bahkan, dalam perjanjian ini, Otoritas Palestina telah dijadikan perpanjangan tangan Israel dalam menekan kelompok-kelompok pejuang Palestina seperti, Hamas, Jihad Islam, dan lain-lain yang dalam perjanjian itu disebut sebagai 'teroris'. Janji Israel untuk menarik mundur tentaranya juga tidak ditepati, bahkan aksi-aksi kekerasan dan pembangunan pemukiman Israel terus dilanjutkan di wilayah Palestina.

Sementara pada Perjanjian Oslo II atau Perjanjian Taba-Mesir 24 September 1995, berisikan: pembagian wilayah Tepi Barat ke dalam 3 Zona. Zona A yang hanya 3% dari wilayah Tepi Barat, secara penuh di bawah kontrol Otoritas Palestina, Zona C seluas 70% wilayah Tepi Barat berada di bawah kontrol militer Israel, dan sisanya, Zona B dikontrol bersama antara Palestina dan Israel. Perjanjian ini juga tidak membawa perbaikan apa pun, karena inti dari perjuangan rakyat Palestina, yaitu mengembalikan para pengungsi ke tanah/rumah mereka masing-masing, sama sekali tidak diakomodasi.

Melihat nagara Palestina, apakah manusia yang berakal sanggup menerima bahwa pembunuhan terhadap orang Yahudi di Barat, dijadikan alasan untuk menduduki tanah air yang dimiliki orang lain dan mendirikan sebuah negara baru di sana, dengan penduduk baru? Apakah konsekuensi bagi sebuah tragedi di Eropa kalaupun itu memang terjadi harus dilakukan di sebuah kawasan di Timur Tengah yang berjarak ribuan kilometer? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu saja mengusik kita bila upaya-upaya ke arah perundingan dan perdamaian akan ditempuh. Sebab, rakyat Palestina tidak melakukan kejahatan apapun. Mereka tidak punya andil dalam Perang Dunia II. Mereka hidup bersama masyarakat Yahudi dan Kristen secara damai pada masa tersebut.

Mereka tidak mempunyai permasalahan. Dan hari ini pun, umat Yahudi, Kristen dan Muslim hidup bersaudara di seluruh dunia, di banyak benua. Mereka tidak memiliki permasalahan yang serius. Akan tetapi, apa sebabnya rakyat Palestina harus membayar semua ini, dengan terbunuhnya ribuan penduduk asli Palestina, dengan terusirnya jutaan orang dan menjadi pengungsi-pengungsi selama 60 tahun lamanya, bukankah ini sebuah kejahatan? Pada konteks lain, perdamaian hanya akan diterima para pemimpin Zionis di Tel Aviv jika tidak berujung pada terbentuknya negara Palestina yang berdaulat, meskipun negara itu hanya memiliki wilayah yang kecil. Judea-Samaria (Tepi Barat) adalah "sakral" bagi Israel, terlebih Yerusalem Timur. Selain itu, hak kembali pengungsi Palestina merupakan bencana demografis bagi Israel, sekaligus dipandang sebagai upaya

menghancurkan hak istimewa sebuah negara Yahudi. "Negara" Palestina hanya akan eksis sebatas sebuah pemerintahan kotapraja yang mengelola urusan administrasi orang-orang Arab saja di wilayahnya. Jadi, selama lebih dari enam dekade, dunia hanya menyaksikan kompromi besar berikut pengorbanan darah dan nyawa dari pihak Palestina. Sementara itu, Israel tidak pernah bergerak seujung kuku pun dari "ambisi-ambisi" fasisnya.

Dengan realitas seperti itu, mungkinkah perdamaian bisa diwujudkan? Oleh karenanya, sekali lagi Ahmadinejad menegaskan bahwa, "Perdamaian yang dicanangkan di atas kezaliman dan tidak didasarkan pada keimanan dan keadilan tidak akan abadi." Kalimat yang hampir senada juga disampaikan oleh Pemimpin Spiritual Islam Iran Sayyed Ali Khamenei, "Perdamaian adalah kata yang indah, namun keadilan lebih penting dan indah."³³

1. Sekilas Perjuangan Palestina Menjadi Anggota PBB

Upaya Palestina mendapat keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bakal menemui jalan terjal. Amerika Serikat (AS) dan Israel hampir pasti menolak proposal Palestina yang rencananya dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB, Bahkan, AS mengancam akan menggunakan hak

³³ M. Riza Sihbudi. *Bara Timur Tengah*. Bandung : Mizan, 1991.

vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB jika ternyata mayoritas negara anggota PBB menyetujui usul Palestina.³⁴

AS menganggap langkah Palestina itu mengingkari peta jalan (road map) perdamaian yang telah digagas kuartet AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB pada 2002. Road map tersebut berisi tiga tahap yang harus ditempuh Palestina dan Israel untuk mencapai perdamaian abadi adalah:

- a) Bahwa pada bulan Mei 2003, Palestina harus menghentikan semua bentuk kekerasan dan Israel menghentikan pembangunan permukiman.
- b) Pada bulan Juni sampai Desember 2003, konferensi internasional pertama diadakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan perumusan batas negara Palestina. Ketiga, pada 2004–2005, konferensi internasional kedua diselenggarakan untuk tujuan finalisasi batas antarnegara dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik.

Namun, realitanya, road map tersebut tidak berjalan mulus. Jalan menuju perdamaian terhenti pada tahap pertama karena Israel hingga kini masih terus membangun dan memperluas permukiman dengan mencaplok wilayah Palestina. Kondisi itulah yang mendorong Presiden Mahmoud Abbas untuk mengajukan usul keanggotaan penuh Palestina di PBB. Harapannya, dengan

³⁴ Demeiati Nur Kusumaningrum, 2011, *Dukungan Rusia Terhadap Palestina menjadi Anggota PBB. Timur Tengah, Jakarta.*

menjadi anggota penuh PBB, negara Palestina merdeka dapat dengan mudah direalisasikan daripada mengikuti kemauan kuartet untuk melanjutkan negosiasi yang dirasa lebih menguntungkan Israel.³⁵

Jika usul tersebut disetujui, bisa dipastikan posisi tawar Palestina akan meningkat. Selama ini, Palestina hanya diakui sebagai entitas dengan status pengamat tanpa hak suara di PBB. Dengan status itu, mereka tidak pernah dianggap sebagai negara seperti halnya 193 anggota PBB lainnya. Akibatnya, otoritas Palestina nyaris tak berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan internasional lain, terutama dengan Israel.

Berbagai macam perundingan yang diadakan menghasilkan kesepakatan timpang yang lebih mengakomodasi kepentingan Israel sebagai negara berdaulat daripada Palestina yang hanyalah entitas kecil tanpa kedaulatan. Ketika Israel melanggar perjanjian, misalnya dengan merebut tanah orang-orang Palestina untuk dimanfaatkan sebagai permukiman, Palestina tidak punya hak untuk mengadukan pelanggaran tersebut ke Mahkamah Internasional. Sebaliknya, Israel bisa bersuara lantang di berbagai forum dunia ketika orang-orang Palestina melawan militer Israel yang merebut hak-hak mereka.

Ketimpangan itulah yang tidak ingin diderita Palestina pada masa depan. Bagi Abbas, pengakuan PBB merupakan syarat mutlak untuk menempatkan

³⁵ *Ibid.*

Palestina sejajar dengan Israel dan negara-negara lain. Dengan berdiri sama tinggi, Palestina bakal memiliki kekuatan lebih besar untuk menuntut hak-hak yang direbut Israel. Kondisi itulah yang sesungguhnya dikhawatirkan AS dan Israel.

Dua negara tersebut tidak ingin daya tawar Palestina semakin kuat dalam proses negosiasi. Mereka berkepentingan untuk terus membuat Palestina tidak berdaya selama masih berunding dengan Israel. Mereka takut, jika Palestina semakin kuat, tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap Israel bakal sulit dihadapang. Salah satu tuntutan itu adalah pengembalian wilayah Palestina sesuai dengan batas teritorial 1967. Sampai kapan pun, Israel tidak akan mau mengembalikan wilayah seperti yang disepakati pada 1967 tersebut. Israel telah merasa sangat aman dan nyaman dengan wilayahnya sekarang yang banyak menganeksasi wilayah Palestina pasca-1967. Wilayah Israel tidak bakal terusik selama Palestina tetap berstatus bukan negara. Karena itu, Israel pasti menggunakan segala cara untuk menghadang jalan Palestina menjadi anggota penuh di PBB.

Saat ini Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, yang menjadi entitas dengan status pengamat. Dengan menjadi anggota penuh maka Palestina menjadi salah satu pihak dalam traktat-traktat internasional, seperti Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC, yang bisa mereka gunakan untuk menuntut pendudukan wilayah oleh Israel. Untuk bisa menjadi anggota PBB, Palestina

mebutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara. Presiden Abbas sudah mengatakan mereka akan menempuh hal itu. Rekomendasi apapun dari Dewan Keamanan membutuhkan dukungan mayoritas 2/3 dari 193 anggota Majelis Umum untuk pengesahan akhir.

Untuk memulai proses ini, Abbas harus mengajukan permohonan resmi kepada Sekjen PBB, Ban Ki Moon dan dia sudah mengatakan akan melakukannya setelah menyampaikan pidato di depan Majelis Umum PBB pada tanggal 23 September. Sekjen PBB kemudian akan meneruskan permohonan itu kepada Dewan Keamanan yang akan membentuk sebuah komite. Untuk bisa lolos, dibutuhkan dukungan sembilan dari 15 suara anggota Dewan Keamanan dan tidak ada veto dari anggota tetapnya. Namun Amerika Serikat sudah menegaskan akan menggunakan hak veto sedangkan Inggris dan Prancis sudah hampir pasti abstain karena mereka tidak bisa mendukung keanggotaan PBB untuk sebuah negara yang belum mereka akui secara bilateral. Jika Amerika Serikat memang menggunakan hak veto atau PLO kemudian mundur dari rencana keanggotaan penuh, maka mereka bisa menyampaikan resolusi kepada Majelis Umum PBB. Perhitungan suara akan dilakukan dalam waktu 48 jam setelah resolusi diterima namun tampaknya akan ditunda hingga Sidang Umum PBB akhir September atau awal Oktober. Dengan demikian akan ada waktu untuk merundingkan naskah resolusi untuk mendapat dukungan maksimal, khususnya dari negara-negara Eropa.

Pengesahan resolusi hanya membutuhkan mayoritas suara terbanyak dari perwakilan negara yang hadir dan tidak ada veto. Resolusi bisa meminta dukungan agar Palestina diterima sebagai 'negara pengamat bukan anggota' yang berarti setingkat dari status PLO saat ini sebagai pengamat. Status negara pengamat bukan anggota antara lain dipegang Vatikan. Dulu Swiss pernah memiliki status ini sebelum menjadi anggota penuh.

Status itu akan meningkatkan peluang Palestina untuk bergabung dengan organisasi-organisasi milik PBB, termasuk ICC walau tidak langsung otomatis atau dijamin. Di antara warga Palestina, juga muncul pertanyaan apakah negara Palestina sebagai dengan status pengamat juga akan mewakili komunitas diaspora Palestina sama dengan yang dilakukan PLO. Dalam pidatonya tanggal 16 September 2012, Abbas menegaskan bahwa status PLO tidak akan terpengaruh. Para diplomat mengatakan resolusi Majelis Umum juga akan bisa memasukkan jumlah negara yang sudah mengakui negara Palestina, menurut duta besar Palestina di PBB saat ini mencapai 126 negara. Selain itu, resolusi juga bisa mencakup permintaan kepada Dewan Keamanan agar Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB maupun parameter dalam perundingan antara Israel dan Palestina. Jadi pada prinsipnya bahwa Palestina bisa menggunakan jalur Dewan Keamanan atau Majelis Umum, maupun keduanya.

2. Rusia Adalah Salahsatu Negara yang Mendukung Palestina Menjadi Anggota Tetap di PBB

Di tengah ancaman veto AS, dukungan dunia tentu sangat diharapkan Palestina. Sekarang merupakan momentum bagi negara-negara di dunia untuk mendukung Palestina mencapai cita-cita sebagai negara merdeka. Israel kini sedang melemah setelah ditinggal Mesir dan Turki yang merupakan sekutu utamanya di Timur Tengah.

Peralihan kekuasaan di Mesir dari Hosni Mubarak ke Omar Sulaiman telah semakin menjauhkan hubungan Mesir dan Israel yang semula sangat dekat sejak perjanjian Camp David 1979. Keengganan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk meminta maaf atas penyerangan terhadap misi kemanusiaan Mavi Marmara berdampak pada keputusan Turki untuk menarik mundur duta besarnya di Israel. Selain itu, Arab Saudi yang selama ini selalu mengikuti kemauan AS telah memberikan sinyal mendukung proposal Palestina.

Di luar negara-negara itu, masyarakat internasional sesungguhnya juga mendukung kemerdekaan Palestina. Hal tersebut terbaca dari jajak pendapat yang dilakukan BBC di 19 negara pada Juli sampai Agustus 2011. Survei via telepon itu mencatat adanya 49 persen warga dunia yang mendukung dan 21 persen yang menolak Palestina merdeka. Hanya, polling tersebut tidak akan

ada artinya tanpa upaya serius dari negara-negara untuk meredam rencana AS menggunakan hak vetonya di DK PBB.

Karena itu, tindakan mendesak yang perlu dilakukan negara-negara pendukung Palestina saat ini adalah mengintensifkan lobi untuk meraup dukungan suara mayoritas di sidang Majelis Umum PBB. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara besar yang selama ini mendukung perjuangan Palestina harus berdiri di garda terdepan untuk merealisasikan misi tersebut. Tidak cukup hanya berkomentar, para diplomat Indonesia harus memanfaatkan posisi negara ini sebagai ketua ASEAN dan anggota G-20 untuk memengaruhi negara-negara lain agar menyetujui usul keanggotaan penuh Palestina di PBB.³⁶

Negara Rusia, adalah salah satu Negara yang memiliki hak veto di PBB, mendukung Negara Palestina menjadi anggota tetap di PBB. Bahkan menjelang Sidang Umum PBB pada 20 September 2011 dilaporkan bahwa Rusia resmi mendukung keinginan Palestina. pemerintah Rusia sangat memahami bahwa Palestina sangat membutuhkan dukungan penuh negara bekas Uni Soviet itu agar dapat menjadi negara berdaulat sesuai dengan perjanjian 1967. Rusia sudah menjadi sekutu Palestina sejak era Perang Dingin, namun Rusia juga menjalin hubungan baik dengan Israel lewat

³⁶ Nur Kusumaningrum, 2011, *Dukungan Rusia Terhadap Palestina menjadi Anggota PBB. Timur Tengah, Jakarta.*

hubungan dagang. Meski demikian, hubungan Rusia dan Israel sempat mengalami hambatan ketika Presiden Rusia Dmitry Medvedev membatalkan kunjungannya ke Israel karena ada protes yang dilancarkan oleh diplomat Rusia.

Diharapkan dukungan Negara Rusia agar status keanggotaan Palestina di PBB yang semula hanya pengamat dapat ditingkatkan menjadi anggota penuh. Pemerintah Rusia akan mendukung segala upaya Palestina untuk menjadi anggota PBB. Voting mengenai negara Palestina akan digelar pada tahun ini di Majelis Umum PBB. Keputusan di Majelis Umum PBB akan menjadi dukungan yang besar bagi Palestina. Palestina bisa mengajukan diri menjadi anggota PBB dengan cara mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB atau mendapatkan dukungan dari 2/3 anggota Majelis Umum yang berjumlah 193 negara.

Dengan status keanggotaan penuh ini, maka Palestina akan mudah mengurus administrasi hukum untuk menuntut Israel di pengadilan Mahkamah Internasional, Den Haag, Belanda. Status sebagai pengamat telah menyebabkan Palestina, ketika berurusan dengan pemerintah Israel, harus selalu menguasai keterwakilannya dengan negara-negara lain di Timur Tengah.